



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

YK
SOGYAKARTA
CITY

2022

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Sultan Agung No. 133, Yogyakarta

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2023

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Yogyakarta



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197214091993031004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat

dengan indikatornya **Persentase Penyelesaian Konflik Sosial** capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 101% dari target 82% terealisasi 82,73%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator persentasepelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dari target 80% tercapai 81,48% atau 102% dari target.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada indikator pertama yaitu persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres dari target 81% tercapai 81% atau 100% dari target. Sedangkan pada indikator kedua yaitu Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik dari target 61,9% tercapai 62,54% atau 101% dari target.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator persentase organisasi terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta dari target 51,5% tercapai 51,96% atau 100% dari target.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya pada indikator pertama yaitu persentase pembentukan Satgas Anti NAPZA dari target 80% tercapai 93,94% atau 117% dari target. Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya dari target 70% tercapai 84,85% atau 121%.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dari target 75% tercapai 75,68% atau 101% dari target.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Keadaan masyarakat Kota Yogyakarta yang plural dan homogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial
2. Masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini.
3. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi
4. Masih adanya organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT
5. Masih maraknya kenakalan remaja yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Yogyakarta
6. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (*The City Of Tolerance*)

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Fungsi dan Tugas.....	2
1.3 Isu-Isu Strategis.....	3
1.4 Keadaan Pegawai.....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
1.6 Keuangan.....	10
1.7 Sistematika LAKIP.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	14
2.1.3 Strategi, program dan kegiatan.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	19
1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	20
1.3. Realisasi Anggaran.....	33
1.4. Inovasi.....	37
1.5. Prestasi dan Penghargaan.....	38
1.6. Kolaborasi Lintas Sektor.....	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	42
BAB V LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar pegawai berdasar jabatan, pangkat dan golongan	4
Tabel 1.2 Daftar pegawai berdasar jenjang pendidikan dan golongan.....	5
Tabel 1.3 Daftar pegawai menurut jenis kelamin	6
Tabel 1.4 Daftar jenis barang	7
Tabel 1.5 Daftar sarana perkantoran	9
Tabel 1.6 Daftar total anggaran belanja daerah	10
Tabel 2.1 Perencanaan strategis menurut RPJMD.....	13
Tabel 2.2 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
Tabel 2.3 Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	14
Tabel 2.4 Sasaran strategis, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15
Tabel 2.5 Perjanjian kinerja tahun 2022.....	16
Tabel 2.6 Perubahan kinerja tahun 2022.....	17
Tabel 2.7 Target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	18
Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja.....	19
Tabel 3.2 Capaian kinerja 2022	19
Tabel 3.3 Rumusan indikator dan formulasi perhitungan.....	21
Tabel 3.4 Target dan realisasi kinerja 2022.....	22
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi sasaran	22
Tabel 3.6 Perbandingan capaian kinerja dengan OPD sejenis.....	23
Tabel 3.7 Persentase capaian program	25
Tabel 3.8 Perbandingan capaian program I.....	26
Tabel 3.9 Perbandingan capaian program II.....	27
Tabel 3.10 Perbandingan capaian program III.....	29
Tabel 3.11 Perbandingan capaian program IV.....	30
Tabel 3.12 Perbandingan capaian program V.....	32
Tabel 3.13 Realisasi Keuangan.....	34
Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.....	36
Tabel 3.15 Analisis Efisiensi.....	37

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
Gambar 1.2 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan	5
Gambar 1.3 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Gambar 1.4 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Jumlah Konflik Sosial.....	20
Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi 2022.....	22
Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Gelar Kebangsaan.....	26
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Sekolah Demokrasi.....	28
Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Gala Ormas.....	29
Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan FGD FKUB.....	31
Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Bimtek Penanganan Konflik.....	32

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022, diharapkan dapat:

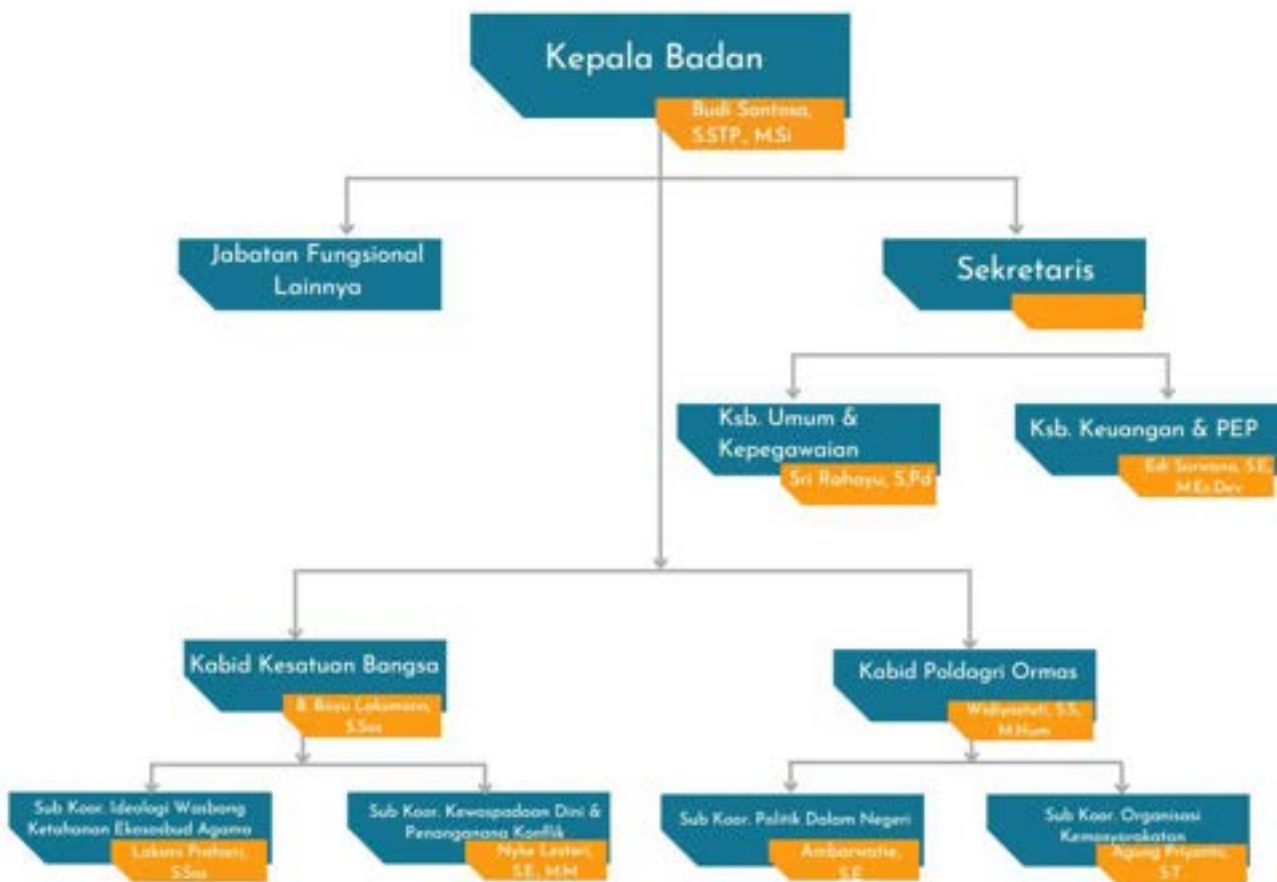
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari 1

Sekretariat dan 2 Bidang. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Bidang Kesatuan bangsa terdiri dari Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, serta Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri dan Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bakesbangpol
Tahun 2022



1.2 Fungsi dan Tugas

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsinya yaitu:

- pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren;
- h. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa;
- j. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Keadaan masyarakat Kota Yogyakarta yang plural dan homogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial
2. Masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini.
3. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

4. Masih adanya organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT
5. Masih maraknya kenakalan remaja yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Yogyakarta
6. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (*The City Of Tolerance*)

1.4 Keadaan Pegawai

- a. Menurut Jabatan, Pangkat dan Golongan

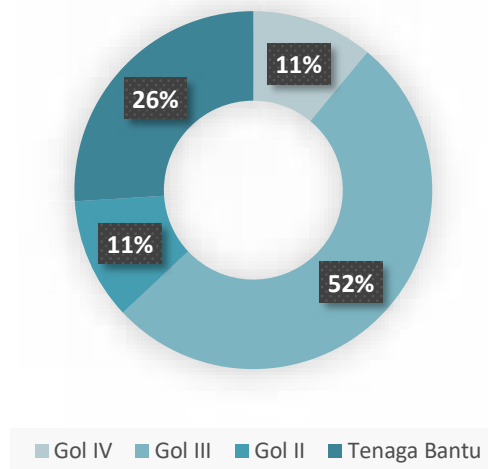
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan
Tahun 2022

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Kepala Badan	Pembina Utama Muda IV/C	1 orang
2	Kepala Bidang	Pembina IV/A	2 orang
3	Kepala Sub Bagian	Penata Tk I III/D	2 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Tk I III/D	4 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda Tk I III/B Penata Muda III/A Pengatur II/C	2 orang 6 orang 3 orang
B	TENAGA BANTUAN		
1	Tenaga Administrasi Umum	Tenaga Bantuan Tenaga Teknis	1 orang 6 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan bisa dilihat dalam grafik 1 sebagai berikut:

Gambar 1.2
 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan
 Tahun 2022



b. Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan

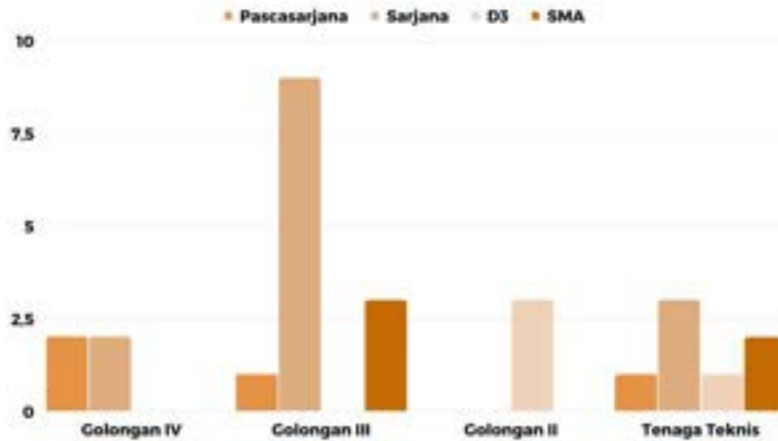
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
 Daftar Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan
 Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	-	
A.	APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)						
1.	Pasca Sarjana	2	2				4 orang
2.	Sarjana	1	9				10 orang
3.	DIII			3			3 orang
4.	SLTA		3				3 orang
B.	TENAGA BANTUAN (NABAN)						
1.	Pasca Sarjana					1	1 orang
2.	Sarjana					3	3 orang
3.	DIII					1	1 orang
4.	SLTA					2	2 orang
	JUMLAH	4	14	3	0	7	27 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan bisa dilihat dalam grafik 2 sebagai berikut:

Gambar 1.3
Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2022



c. Menurut Jenis Kelamin

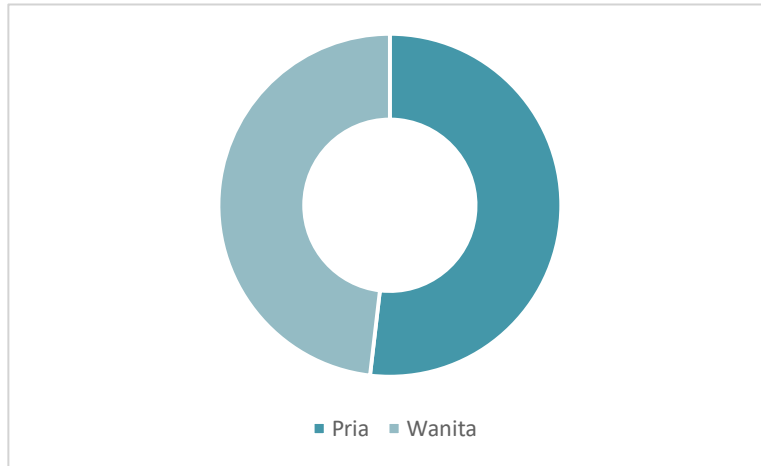
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 1.3

Tabel 1.3
Susunan Organisasi dan Kondisi Personil
Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
A	APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Kepala Badan	1 orang		1 orang
2	Kepala Bidang	1 orang	1 orang	2 orang
3	Kepala Sub Bagian	1 orang	1 orang	2 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	1 orang	3 orang	4 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	5 orang	6 orang	11 orang
B	TENAGA BANTUAN			
1	Tenaga Administratif		1 orang	1 orang
2	Tenaga Teknis	5 orang	1 orang	6 orang
	Jumlah	14 orang	13 orang	27 orang

Daftar pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam grafik 3 sebagai berikut:

Gambar 1.4
Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022



1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per Desember 2022

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI
Jumlah KIB A			
1	Station Wagon	4	B
2	Sepeda Motor	7	B
3	Sepeda	1	B
4	Mesin Ketik Manual Langewagen (18-27 Inchi)	2	B
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	R
6	Mesin Absen (Time Recorder)	1	B
7	Lemari Besi/Metal	14	B
8	Lemari Kayu	4	B
9	Rak Besi	12	B
10	Rak Kayu	5	B
11	Filing Cabinet Besi	19	B
12	Brandkas	2	R
13	Kardex Besi	1	B

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

14	Lemari Kaca	9	B
15	CCTV	1	B
16	LCD Projector/Infocus	7	B
17	LCD Projector/Infocus	1	R
18	Meja Kerja Kayu	7	B
19	Kursi Kayu	25	B
20	Sice	3	B
21	Meja Rapat	17	B
22	Meja Rapat	2	R
23	Meja 1/2 Biro	19	B
24	Kursi Rapat	25	B
25	Kursi Putar	18	B
26	Kursi Putar	2	R
27	Kursi Lipat	53	B
28	Meja Komputer	3	R
29	Meja Komputer	5	B
30	Jam Elektronik	5	B
31	A.C. Window	11	B
32	Kipas Angin	3	B
33	Exhause Fan	1	B
34	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	B
35	Radio	1	B
36	Televisi	2	B
37	Tape Recorder	1	B
38	Sound System	1	B
39	Wireless	2	B
40	Megaphone	1	B
41	Dispenser	5	B
42	Alat Pemadam/Portable	4	B
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	B
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	B
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	B
46	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	B
47	Camera Digital	4	B
48	Pesawat Telephone	3	B
49	Alat Komunikasi Sosial	2	B
50	P.C Unit	17	B
51	Lap Top	5	B
52	Note Book	2	B
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	B
54	External/ Portable Hardisk	7	B
55	Uninterrupted Power Supply (UPS)	18	B

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

Jumlah KIB B			
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	B
Jumlah KIB C			
57	Buku - Ilmu Politik	4	B
58	Buku - Ekonomi	3	B
59	Buku - Hukum	1	B
60	Buku - Pendidikan	4	B
61	Buku - Perdagangan	1	B
62	Buku - Management dan Perkantoran	2	B

**Keterangan: B=baik; R=rusak*

Selain itu dalam rangka melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, sarana yang mendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Sarana Perkantoran dan Kondisinya
Per Desember 2022

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pendopo	1	Kondisi baik
2.	Kamar Mandi/WC	4	Kondisi 2 baik, 2 kurang baik
3.	Ruang Rapat	1	Kondisi cukup baik
4.	Ruang Kepala	1	Kondisi baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Kondisi baik
6.	Ruang Sekretariat	1	Kondisi baik
7.	Ruang Kepala Bidang Kesbang	1	Kondisi baik
8.	Ruang Bidang Kesbang	1	Kondisi baik
9.	Mushola Kantor	1	Kondisi baik
10.	Ruang Kepala Bidang Poldagri dan Ormas	1	Kondisi baik
11.	Ruang Bidang Poldagri dan Ormas	1	Kondisi baik
12.	Papan Nama Kantor	1	Kondisi baik
13.	Kendaraan Dinas Kantor	11	Kondisi baik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

14.	Ruang Dapur	1	Kondisi baik
15.	Air bersih, listrik, telepon, dan internet	Paket	Kondisi baik

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu tidak adanya ruang pendukung seperti ruang perpustakaan, ruang resepsionis dan kursi tunggu untuk tamu, serta ruang laktasi yang memadai. Hal ini masih cukup jauh dari ruang kantor yang representatif.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp10.550.999.282 dengan rincian belanja operasi Rp 10.315.591.382 dan belanja modal Rp 235.407.900 sebagaimana diubah dalam Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang disahkan mulai 13 Oktober 2022, menjadi sebesar Rp. 10.978.623.132, dengan rincian belanja operasi Rp 10.723.105.232 dan belanja modal Rp 255.517.900, yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.6
Daftar Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 (perubahan)

No	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	Rp 10.723.105.232
2.	Belanja Modal	Rp 255.517.900
	Jumlah Total Anggaran (Setelah Perubahan)	Rp 10.978.623.132

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta

sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang alasan disusunnya/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, isu strategis, kondisi pegawai dan sarana prasarana, serta Sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi, prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB V LAMPIRAN

Memuat struktur organisasi, matriks Renstra, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, dan matriks tindak lanjut SAKIP 2021.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan	Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	Kemiskinan Masyarakat Menurun
		Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	Kualitas pendidikan meningkat
		Harapan hidup masyarakat meningkat
		Peran serta masyarakat dalam pengembangandan pelestarian budaya meningkat
	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
Kualitas lingkungan hidup meningkat		
Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayahmeningkat	
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah: **Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun** dengan indikator capaian sasaran **Persentase Penyelesaian Konflik Sosial**. Selain itu juga mendukung sasaran **Pertumbuhan Ekonomi Meningkat** melalui perannya dalam meningkatkan kondusifitas daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangkamenengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran adalah:

Tabel 2.2
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

NO.	TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian konflik sosial	persen	70	72	76	77	80	82

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	persen	70	72	76	77	80	82

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Yogyakarta

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkatkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (murni)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	82%

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran 2022	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.360.427.212	APBD 2022
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.839.410.250	APBD 2022
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.191.393.458	APBD 2022
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Rp 370.841.544	APBD 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

	Kemasyarakatan		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Rp 1.081.750.270	APBD 2022
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.707.176.548	APBD 2022
Jumlah Anggaran		Rp10.550.999.282	

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan dan rasionalisasi anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	82%

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran Perubahan 2022	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.572.725.212	P-APBD 2022
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.880.035.250	P-APBD 2022
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.191.174.308	P-APBD 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 475.466.544	P-APBD 2022
5.		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Rp 1.084.325.270	P-APBD 2022
6.		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.774.896.548	P-APBD 2022
Jumlah anggaran			Rp 10.978.623.132	

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp10.550.999.282 dengan rincian belanja operasi Rp 10.315.591.382 dan belanja modal Rp 235.407.900 sebagaimana diubah dalam Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang disahkan mulai 13 Oktober 2022, menjadi sebesar Rp. 10.978.623.132, dengan rincian belanja operasi Rp 10.723.105.232 dan belanja modal Rp 255.517.900. Target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 termuat dalam Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp 10.723.105.232	98%
Belanja Modal	Rp 255.517.900	2%
Jumlah Total Anggaran (Setelah Perubahan)	Rp 10.978.623.132	100%

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2022

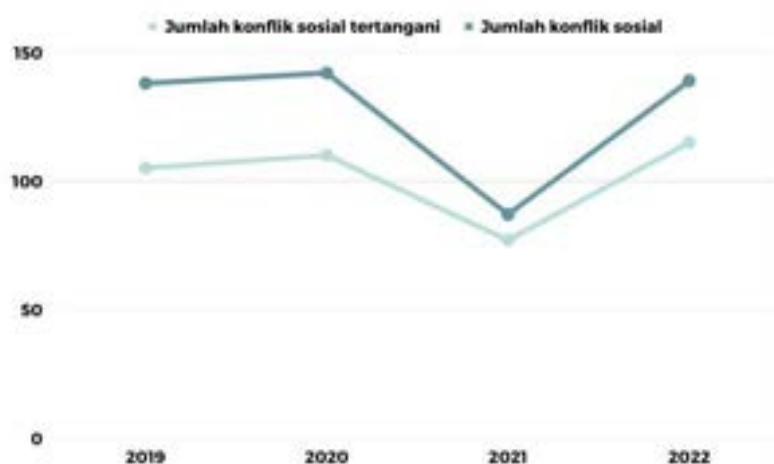
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Persentase Penyelesaian Konflik	%	82	82,73	101%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya mempunyai satu sasaran strategis seperti yang terlihat dalam tabel di atas. Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran dan satu Indikator kinerja. Pada tahun 2022, indikator kinerja untuk sasaran ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 82,73% dari target yang ditetapkan sebesar 82%. Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 101%. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik yang terjadi dikali 100%. Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dianalisis bisa menimbulkan potensi konflik di Kota Yogyakarta. Jumlah konflik yang terjadi dan terdata pada bulan Januari hingga Desember 2022 ini meningkat dibandingkan tahun 2021 di mana dari **87** kasus dapat diselesaikan **77**, sementara untuk tahun 2022 ini terdata sebanyak **139** kasus dan bisa diselesaikan sebanyak **115** kasus.

Perbandingan data konflik sosial yang terjadi dengan konflik sosial yang tertangani dari tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1

Perbandingan Jumlah Konflik Sosial dari Tahun ke Tahun



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran 5 “Pertumbuhan Ekonomi Meningkat”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut serta membantu ketercapaian sasaran Daerah

nomor 5 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Meningkat. Pertumbuhan ekonomi sendiri terdiri dari beberapa aspek di antaranya peningkatan ekonomi sektor pariwisata, peningkatan ekonomi sektor perdagangan, peningkatan ekonomi sektor industri, peningkatan infrastruktur, perizinan dan penanaman modal serta stabilitas keamanan. Aspek stabilitas keamanan inilah yang menjadi sasaran Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung, melalui upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan antara lain dengan pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

3.2.2 Sasaran 6 "Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurun"

Jika pada ketercapaian sasaran 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sebagai pendukung salah satu aspek yaitu stabilitas keamanan, maka pada sasaran ke 6 ini, Badan Kesbangpol termasuk dalam OPD yang berperan secara langsung, yaitu dari aspek pencegahan atau preventif. Tolak ukur capaian sasaran OPD pada sasaran ke-6 ini adalah Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik yang terjadi dikali 100%. Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dianalisis bisa menimbulkan Potensi Konflik di Kota Yogyakarta. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani/ Jumlah konflik sosial yang terjadi x 100

Kinerja sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat dari tahun sebelumnya dengan indikator Persentase Penyelesaian Konflik pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 thd target akhir
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyelesaian Konflik	88,5	82	82,73%	101%	82	101%

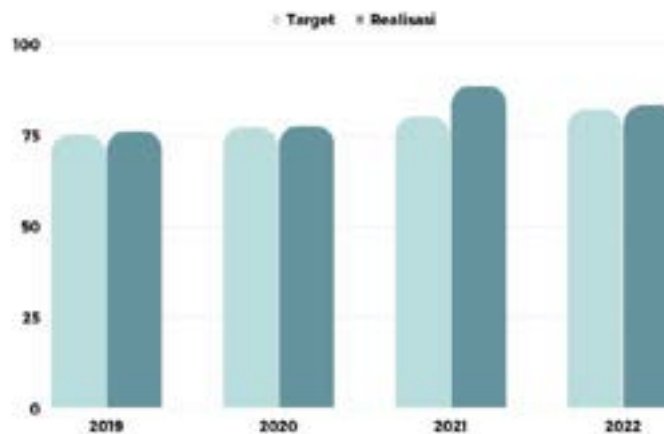
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Indikator Sasaran Persentase Penyelesaian Konflik Tahun 2022 ini dinyatakan **BERHASIL**, hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 83% dari target pada tahun ini sebesar 82% yang berarti capaian kinerja untuk Indikator ini tercapai 101% (sangat baik). Realisasi ini menurun dari capaian tahun tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 88,5% dari target 80%. Berikut perbandingan realisasi capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Penurunan capaian kinerja tahun 2022 disebabkan karena adanya peningkatan terhadap jumlah potensi konflik yang terjadi. Seiring dengan telah dimulainya pentahapan pemilihan umum, baik pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024, maka kondisi ini harus dikelola dengan baik karena berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya potensi konflik sosial.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Sasaran dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Realisasi				Target Renstra 2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Penyelesaian Konflik	76	77,46	88,5	82,73	82

Untuk tahun ke-enam di tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil menunjukkan capaian yang sangat baik (berhasil) karena bisa mencapai target yang telah ditetapkan, target tahun 2022 ini sebesar 82 % sedangkan realisasi pada tahun 2022 ini sebesar 82,73%.

Gambar 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran dari Tahun ke Tahun



Dari gambar 3.1 tersebut kondisi pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2019-2021 persentase konflik sosial yang tertangani meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pada tahun 2022 sedikit menurun, namun masih di atas target. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta (BNNK)*, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Yogyakarta.

Selain perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun, perbandingan capaian kinerja dengan OPD lain yang sejenis juga dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang lebih akurat. Berikut ini disajikan perbandingan indikator, target dan realisasi sasaran strategis dari 4 OPD lain.

Tabel 3.6
Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis

No	Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi thd target
1	Kesbangpol Kota Yogyakarta	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik	82%	88,5	110,6%
2	Kesbangpol Kota Malang	Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	70,00%	50,43%	72%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

3	Kesbangpol Kab Lahat	Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	Jumlah Konflik sosial menurun tiap tahunnya	4 kasus	4 kasus	100%
4	Kesbangpol Kab Bengkalis	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan potensi konflik	70,00%	10%	14,2%
5	Kesbangpol Kab Banjar	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Kasus kriminal	248 kasus	160 kasus	155%

Sumber: data tahun 2021

Beberapa alasan diambilnya Badan Kesbangpol Kota Malang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Banjar sebagai pembanding, di antaranya yaitu:

- a. Ketersediaan dan kemudahan akses data LAKIP melalui website masing-masing OPD
- b. Adanya kemiripan atau kesamaan sasaran dan indikator capaian sasaran.

Tahun 2022 merupakan tahun di mana Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Kegiatan yang semula pada tahun 2021 banyak dilakukan secara daring dan jumlah peserta yang dibatasi, pada tahun 2022 ini mulai diselenggarakan secara luring dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Penyelenggaraan kegiatan Gelar Kebangsaan yang semula hanya dihadiri 300 tamu, tahun 2022 ini mulai membuka acara untuk umum, sehingga jumlah yang hadir mencapai hampir 600 orang. Pada masa pemulihan ini lah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan segala keterbatasannya dapat memenuhi target tujuan perangkat daerah yaitu **meningkatkan kondusifitas daerah** dan sasaran strategis yaitu **penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat**. Baik tujuan dan sasaran memiliki indikator yang sama yaitu **persentase penyelesaian konflik sosial sosial**.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini, di antaranya:

- a) Dukungan dana dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
- b) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kota Yogyakarta, seperti FKUB, FKDM, FPK, dan FORKOPIMDA.
- c) Dukungan warga Yogyakarta secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas kota Yogyakarta
- d) Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 5 (lima) program eksternal dan 1 (satu) program internal yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun

2022 ini:

Tabel 3.7
Persentase Capaian Program Tahun 2022

No	Nama Program	Formula	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana prasarana yang tercapai dibagi dengan target dikali 100%	Nilai SAKIP A	Nilai SAKIP A
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100%	80%	81,48%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada / Pileg / Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar di DPT dikali 100%	81%	81%
		Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bangkesbangpol Kota YK	61,9%	62,54%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikali 100%	51,5%	51,96%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Satgas Anti NAPZA di SMP dibagi jumlah SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%	80%	93,94%
		Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100%	70%	84,85%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terjadi dikali 100%	75%	75,68%

Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 81,48% dari target 80%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta dikali 100%. Pada tahun 2022 ini

jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya dan menjalani post test sebanyak 810 orang, sedangkan yang meningkat pemahamannya sebanyak 660. Maka perhitungannya $(660/810) \times 100\% = 81,48\%$. Hal ini dapat tercapai karena antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dan kinerja SDM yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila. Adapun faktor penghambatnya yaitu pelaksanaan kegiatan masih bersifat klasikal sehingga beberapa peserta terutama generasi muda sulit untuk memahami materi. Maka dari itu, akan dibuat silabus pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan Permendagri No. 71 tahun 2012 dengan ciri khas budaya lokal keistimewaan Yogyakarta serta konsep kegiatan yang lebih menarik untuk ke depannya.

Secara umum, jumlah peserta yang disasar dalam program ini meningkat dibandingkan tahun lalu, di mana tahun lalu jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan Pancasila sebanyak 500 orang sementara tahun ini sebanyak 810 orang. Data perbandingan capaian sasaran program ini dapat dilihat dalam tabel 3.8:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Program 1

Nama Program	Formula	2021	2022
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100%	75%	81,48%
	<i>Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya</i>	375	660
	<i>Jumlah peserta yang disasar</i>	500	810

Gambar 3.3
Dokumentasi Kegiatan Gelar Kebangsaan



2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik

dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Ada dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini, yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres dan Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik. Untuk indikator pertama formulanya adalah rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada/Pileg/Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dikalikan 100%. Dari target 81% telah tercapai 81% atau 100% dari target. Hal ini merupakan data numerik dari KPU Kota Yogyakarta berdasarkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 yang lalu.

Sedangkan indikator kedua memiliki formula: jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2022 beberapa lembaga yang disasar pendidikan politik antara lain Sekolah Menengah, Kemantren, kampung, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga lain yang bermitra dengan Badan Kesbangpol. Dari data tahun 2022 didapatkan jumlah lembaga yang telah disasar pendidikan politik sejumlah 212 lembaga dari 339 jumlah lembaga yang terdaftar. Sehingga didapatkan $(212/339) \times 100\% = 62,54\%$ dari target semula 61,90%. Maka realisasi program ini telah mencapai 101%. Hal ini didorong oleh faktor-faktor antara lain tingginya minat warga Kota Yogyakarta untuk mengikuti Pendidikan Politik. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian target adalah, kegiatan dilaksanakan di saat jam kerja sehingga banyak peserta yang tidak bisa hadir. Untuk mengatasi kendala tersebut, ke depannya Badan Kesbangpol akan mempertimbangkan pemilihan waktu yang lebih tepat, serta menggunakan metode yang lebih menarik dan interaktif.

Pada tahun 2022 ini jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik telah meningkat dibandingkan tahun 2021. Pada 2021, dari 339 lembaga yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, 189 di antaranya telah disasar pendidikan politik. Sementara tahun 2022 ini sebanyak 212 lembaga yang telah disasar pendidikan politik, di antaranya sekolah, ormas, PKK, forum pemuda, dan lain sebagainya. Perbandingan jumlah lembaga yang disasar tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Program 2

Nama Program	Formula	2021	2022
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada / Pileg / Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar di DPT dikali 100%	81%	81%
	Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota YK	55,75%	62,54%
	<i>Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik</i>	189	212

	Jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota YK	339	339
--	---	-----	-----

Gambar 3.4
Dokumentasi Kegiatan Sekolah Demokrasi



3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta, yang diformulasikan dengan jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2022 ini jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol sejumlah 179 dan yang terdata dan teregister sebanyak 93. Sehingga didapatkan $(93 / 179) \times 100\% = 51,96\%$ dari target 51,5%. Target program ini dapat tercapai karena adanya antusiasme ormas dalam mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Selain itu, Badan Kesbangpol juga menyelenggarakan acara yang melibatkan ormas seperti Sapa Mas Jo (Sapa Ormas Jogja), Bakti Mas Jo (Bakti Ormas Jogja), Gala Ormas, dan Diaspora (Dialog Seputar Politik dan Ormas). Adapun yang menjadi penghambat dari program ini yaitu masih adanya beberapa ormas yang belum memiliki legal standing baik Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maupun Administrasi Hukum Umum (AHU). Strategi untuk mengatasi faktor penghambat tercapainya sasaran ini adalah dengan cara lebih proaktif dalam mendatangi dan menggandeng Ormas untuk mendaftarkan dirinya ke Badan Kesbangpol untuk mendapatkan SKT maupun AHU.

Dengan strategi tersebut, jumlah ormas yang terdata maupun teregister di Kota Yogyakarta meningkat dibandingkan tahun 2021. Data jumlah ormas terdata dan teregister tahun

2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.10:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Program 3

Nama Program	Formula	2021	2022
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikali 100%	44%	51,96%
	<i>Jumlah organisasi teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta</i>	69	93
	<i>Jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta</i>	157	179

Gambar 3.5
Dokumentasi Kegiatan Gala Ormas



4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Ada dua indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini, yang pertama yaitu Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA dengan formula Jumlah satgas anti napza di SMP dibagi Jumlah SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%, dan yang kedua Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya dengan formula Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100%. Untuk indikator pertama, telah didapatkan data jumlah Satgas anti NAPZA yang sudah terbentuk sebanyak 62 satgas, sedangkan jumlah SMP yang terdata di Kota Yogyakarta sebanyak 66. Sehingga didapatkan $(56/66) \times 100\% = 93,94\%$ atau tercapai 117% dari target semula 80%. Beberapa kendala yang menghambat proses tercapainya target tersebut antara lain masih terbatasnya kemampuan pembinaan serta pemantauan langsung ke

sekolah-sekolah, terlebih lagi ada beberapa sekolah belum melaporkan SK Satgas Anti Napza. Selain itu, belum adanya rencana aksi dan panduan spesifik untuk kegiatan Tim Satgas sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam menyusun SK dan menjalankan tugas siswa-siswi sebagai Satgas Anti Napza. Untuk menindaklanjuti beberapa kendala yang terjadi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan Napza Crisis Center (NCC) dan Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta (BNNK) untuk memantau langsung dan mengadakan pembinaan ke sekolah-sekolah, serta menyusun rencana aksi bersama NCC dan Forum Anti Napza.

Indikator kedua telah tercapai 84,85% dari target 70% atau tercapai 121%, dengan perhitungan sebagai berikut: konflik berbasis ekonomi, sosial budaya yang tertangani sebanyak 56 kasus, sedangkan total seluruh konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi sebanyak 66 kasus. Sehingga $(56/66) \times 100\% = 84,85\%$. Target ini dapat tercapai karena faktor komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah yang cukup efektif sehingga dapat meredam potensi konflik berbasis sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan hal yang menjadi penghambat adalah faktor masih kurangnya kemampuan kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi setiap potensi konflik/konflik, serta penanganan konflik. Maka dari itu, Badan Kesbangpol menyelenggarakan Bimtek Penanganan Konflik untuk anggota FKDM dan tokoh masyarakat sebagai upaya tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

Kedua capaian indikator program ini menunjukkan hasil yang positif dibandingkan tahun lalu. Jumlah Satgas Anti Napza di SMP meningkat dari semula 52 Satgas menjadi 62 Satgas. Sementara untuk konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, namun penanganan konflik juga meningkat sehingga capaian program tetap melampaui target. Perbandingan data kedua capaian program ini dapat dilihat pada tabel 3.11:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Program 4

Nama Program	Formula	2021	2022
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Satgas Anti NAPZA di SMP dibagi jumlah SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%	76%	93,94%
	<i>Jumlah Satgas Anti NAPZA di SMP</i>	52	62
	<i>Jumlah SMP di Kota Yogyakarta</i>	68	66
	Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100%	67%	84,85%
	<i>Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani</i>	8	56
	<i>Konflik yang terjadi</i>	12	66

Gambar 3.6

Dokumentasi Kegiatan FGD FKUB Pengurus Rumah Ibadah



5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah, dari yang ditargetkan 75% dapat tercapai 75,68%. Untuk formulasi perhitungan didapatkan dari jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah konflik sosial yang terjadi. Data ini bersumber dari SISDASISCAM (Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik) dan dirangkum dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Tahun 2022 ini tercatat sejumlah 37 konflik, dan sebanyak 28 yang dapat tertangani, sehingga $(28/37) \times 100\% = 75,68\%$, atau merupakan 101% dari yang telah ditargetkan. Hal ini didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FORKOPIMDA dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Dalam pencapaian target program ini, masih terdapat kendala seperti masih rendahnya pengentryan laporan setiap potensi konflik/ konflik yang terjadi di wilayah, dikarenakan keterbatasan dari petugas entry data sidasiscam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan bimtek kewaspadaan dini bagi para aparaturnya kemantren dan kelurahan.

Jumlah konflik sosial yang terjadi wilayah pada tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun lalu, di mana pada tahun 2022 hanya terjadi 37 konflik sosial, sementara pada tahun 2021 terjadi 140 konflik sosial. Perbandingan jumlah konflik sosial yang terjadi dan yang tertangani dapat

dilihat dalam tabel 3.12:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Program 5

Nama Program	Formula	2021	2022
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terjadi dikali 100%	85%	75,68%
	<i>Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan</i>	119	28
	<i>Jumlah konflik sosial yang terjadi</i>	140	37

Gambar 3.7
Dokumentasi Kegiatan Bimtek Penanganan Konflik



Secara umum, beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian sasaran perangkat daerah di antaranya yaitu:

1. Heterogenya masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya
2. Permasalahan masih adanya peredaran gelap narkoba di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini
3. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (*The City Of Tolerance*)
4. Masih maraknya kenalakan remaja (klitih) di lingkungan Kota Yogyakarta yang meresahkan warga dan dapat menjadi pemicu konflik

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut dengan:

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat
3. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku
4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan
5. Memaksimalkan peran media sosial untuk diseminasi dan kampanye mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar agama serta suku bangsa, agar pesan yang akan disampaikan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat umum.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp 10.421.814.628 atau sebesar 94,93% dari total anggaran yang dialokasikan. Sebanyak 40,45% anggaran dialokasikan untuk mendanai kegiatan internal seperti gaji pegawai, renovasi gedung, pembelian mebel, perlengkapan komputer serta kelengkapan sarana prasarana. Sedangkan sebanyak 59,55% anggaran dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan eksternal yang mendukung keberhasilan sasaran program.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Keuangan per Kegiatan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.572.725.212	4.215.836.551,00	92,20%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.970.000	22.970.000,00	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.296.063.000	3.011.123.202,00	91,36%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.309.480	424.184.681,00	95,47%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.500.000	22.540.000,00	95,91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	451.472.732	424.622.158,00	94,05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.410.000	310.396.510,00	92,82%
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.880.035.250	1.810.518.545,00	96,30%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.880.035.250	1.810.518.545,00	96,30%
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.191.174.308	1.150.565.908,00	96,59%
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.191.174.308	1.150.565.908,00	96,59%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	475.466.544	443.897.257,00	93,36%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	475.466.544	443.897.257,00	93,36%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.084.325.270	1.069.822.155,00	98,66%
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1.084.325.270	1.069.822.155,00	98,66%
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.774.896.548	1.731.174.212,00	97,54%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.774.896.548	1.731.174.212,00	97,54%
	Total	10.978.623.132	10.421.814.628,00	94,93%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa program yang memiliki serapan anggaran tertinggi adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal ini dapat tercapai selain karena perencanaan dan penganggaran yang tepat serta kerjasama antara Bakesbangpol dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan program yang memiliki serapan anggaran paling rendah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebesar 92,20%. Pada program ini, penyerapan anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada rekening belanja gaji dan tunjangan ASN tidak semuanya terserap, karena adanya pegawai yang pensiun dan hingga akhir tahun anggaran belum ada penggantinya.

Berikut disampaikan juga pengukuran kinerja perangkat daerah yang sudah masuk di sistem E-SAKIP sebagai lampiran untuk analisa pencapaian pendukung sasaran.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
Berdasarkan Aplikasi SIMONEVA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV	
					Realisasi	%				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	82 %	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi X 100%	82,73 %	101%	Melampaui target	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp4.572.725.212	Rp4.215.836.551	92,2%
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp1.880.035.250	Rp1.810.518.545	96,3%
								PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp1.191.174.308	Rp1.150.565.908	96,59%
								PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp475.466.544	Rp443.897.257	93,36%
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp1.084.325.270	Rp1.069.822.155	98,66%
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA	Rp1.774.896.548	Rp1.731.174.212	97,54%
Faktor Pendorong => Kondisi potensi konflik sosial memungkinkan untuk ditangani melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait											
Uraian Permasalahan => Jumlah potensi konflik dibandingkan tahun 2021 ada peningkatan, mayoritas peningkatan ada di bidang sosial ekonomi, masih ada sisa potensi yang belum dapat diselesaikan											
Rencana Tindak Lanjut => Selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan penguatan deteksi dini terhadap potensi konflik sehingga dapat menekan kuantitas/jumlah potensi konflik yang terjadi											

Sumber: SIMONEVA 2022

Analisis Efisiensi

Pada dasarnya realisasi sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran terjadi karena telah melakukan efisiensi. Sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkatkan Telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 5,07% yang diperoleh melalui efisiensi pemakaian listrik dan pengurangan belanja sewa gedung untuk kegiatan Gelar Kebangsaan, yang semula menganggarkan sewa gedung milik swasta menjadi gedung milik Pemerintah Provinsi DIY sehingga menghemat pengeluaran.

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkatkan	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	94,93	5,07%

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2022 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menginisiasi inovasi, di antaranya:

a) Sekolah Demokrasi

Sekolah Demokrasi adalah aksi perubahan dalam bentuk kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk peningkatan kualitas pemahaman sumberdaya manusia usia muda untuk cerdas dalam berpolitik dan berdemokrasi di jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya, Sekolah Demokrasi diharapkan dapat memasok sumberdaya manusia usia muda yang memiliki kompetensi kepemiluan baik teknis dan non teknis sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Penyelenggaraan Sekolah Demokrasi ini sendiri digagas akan dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta,

KPU Kota Yogyakarta dan Kemantren.

b) Parenting Kebangsaan

Parenting Kebangsaan bertujuan memberikan pemahaman karakter budaya dan ke-Indonesiaan, melalui pengenalan wawasan kebangsaan dan pendidikan Ideologi Pancasila kepada anak usia dini dan dilakukan oleh orang tua masing-masing. Perkembangan pemahaman anak dipantau dengan Kartu Si Kumbang dan dievaluasi pada saat kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), yang disinergikan dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri anak mulai usia dini, dan dari hal-hal kecil seperti menanamkan demokrasi, musyawarah dalam keluarga, mengenal pahlawan-pahlawan nasional serta memperdengarkan lagu wajib nasional.

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Di tahun 2022 ini, Badan Kesbangpol meraih beberapa penghargaan di tingkat Kota Yogyakarta maupun tingkat Provinsi, di antaranya:

a) Peringkat Ke-dua Kategori Eselon II Capaian Kinerja terbaik Tahun 2022

Pada tanggal 31 Januari 2022, Badan Kesbangpol mendapatkan peringkat ke-2 dalam Prestasi Capaian Kinerja 2021 Kategori Eselon II dari Walikota Yogyakarta. Hal ini tentu saja menjadi pemacu bagi seluruh pegawai untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang.

b) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai Badan Publik Informatif

Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta beserta 145 badan publik lainnya, atau 37,96% OPD di wilayah Provinsi DIY, berhasil mendapatkan predikat informatif dalam hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY pada 2022. Tahapan pelaksanaannya telah dimulai sejak Maret 2022 dan berakhir pada September 2022. Hasil akhir penilaian Badan Kesbangpol mendapatkan nilai 94 (informatif). Prestasi ini dapat diraih karena komitmen Badan Kesbangpol untuk meningkatkan akuntabilitas dengan mempublikasikan dan menyajikan data serta informasi yang berguna untuk masyarakat.

c) Penghargaan Anugerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Komitmen untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak terus dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya dengan cara memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, dalam penghargaan Anugerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (KPAID Awards) Tahun 2022. Dalam Penganugerahan ini, Badan Kesbangpol berhasil memenangkan Kategori OPD Ramah Anak.

3.6 Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa mitra yang senantiasa bekerjasama. Mitra-mitra pendukung ini berasal dari berbagai instansi dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, dan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas, dibentuklah tim dan forum, di antaranya:

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. FKUB Kota Yogyakarta dibentuk melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2018.

b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

FPK dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 70 Tahun 2019 dan memiliki fungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik melalui pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik.

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Untuk mengatasi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2019. Pembentukan FKDM dimaksudkan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala suatu peristiwa.

d) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kota Yogyakarta, forum ini diketuai Walikota Yogyakarta dan beranggotakan Wakil Walikota,

Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Forkompida ini dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019, untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota, dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di kota Yogyakarta.

e) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Yogyakarta

TKD di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh kota tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas kota Yogyakarta. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/ instansi diantaranya Polresta, Kesbangpol, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

f) Forum Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Forum P4GN ini dibentuk dengan berdasar Keputusan Walikota Nomor 94 Tahun 2019. Forum ini dibentuk untuk pencapaian tujuan “Indonesia Bebas Narkoba” sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Forum ini mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan cara menjaring, menampung, menkomunikasikan data dan informasi dari masing-masing lembaga yang berkaitan dengan P4GN, dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

g) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2019. Tim ini mengemban tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu tim ini juga mengawasi perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

h) Tim Pengawasan Orang Asing

Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta. Dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Yogyakarta, Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk untuk memantau, mengkoordinasikan, merencanakan, mencari, menkomunikasikan informasi mengenai keberadaan orang asing dan ormas asing. Selain itu tim juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman orang asing.

i) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Badan Kesbangpol bersinergi dengan KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan mengenai demokrasi dan kepemiluan sebagai bentuk usaha meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum mendatang.

j) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Badan Kesbangpol bersama dengan KPU juga bekerjasama dengan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepemiluan terutama untuk generasi muda, kelompok perempuan, kelompok difabel, marginal dan tokoh masyarakat.

k) Tim Pengawas Terpadu Ormas (TPT Ormas)

TPT Ormas terdiri dari FORKOPIMDA, anggota intelijen kepolisian, Kejaksaan, KODIM dan BIN Kota Yogyakarta, memiliki fungsi dan tugas memonitoring dan memantau ormas-ormas yang aktif berkegiatan atau terlibat aksi. Kemudian hasil dari pemantauan ormas tersebut dituangkan dalam laporan, dan rapat koordinasi yang diadakan 2 bulan sekali.

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke 6 dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 82,73 % dari target 82% sehingga capaian IKU mencapai 101%.
2. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar Rp 10.421.814.628 atau sebesar 94,93% dari total anggaran Rp 10.978.623.132.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
- b. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
- c. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.
- d. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan.
- e. Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

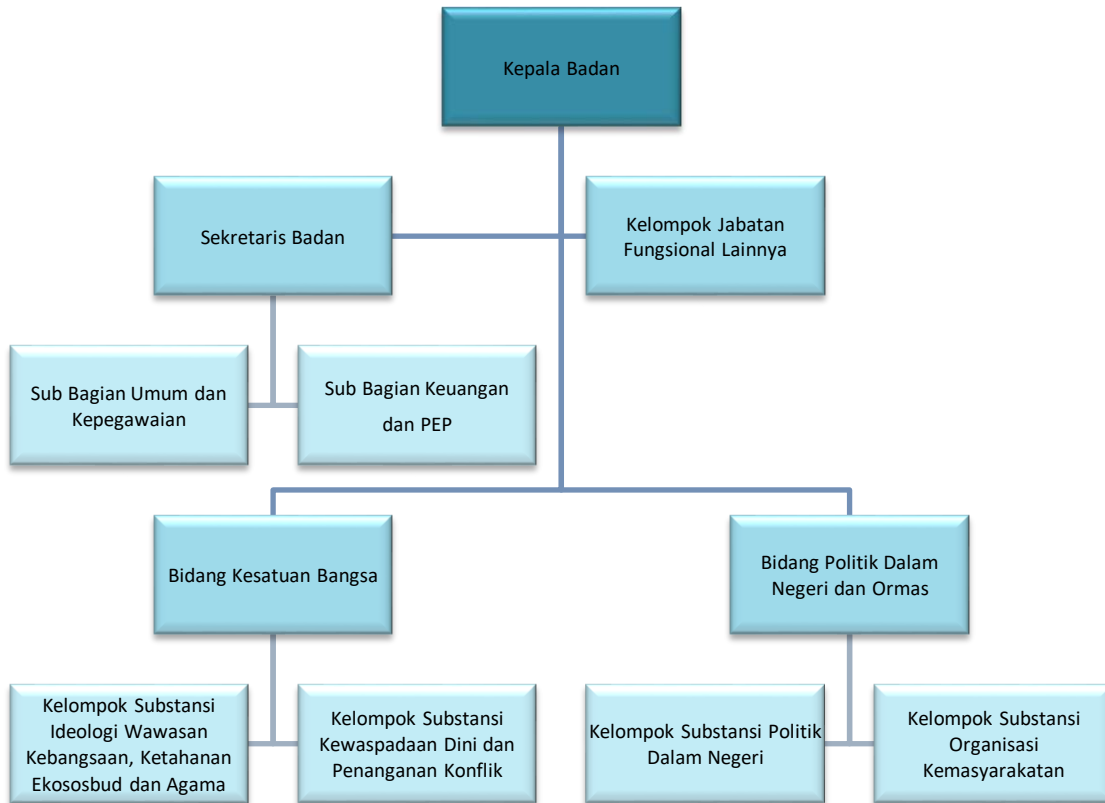
bangsa agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat luas, sehingga tercipta kondusifitas dan stabilitas daerah.

BAB 5

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. CASCADING DAN POHON KINERJA
3. PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
4. PENGUKURAN KINERJA
5. MATRIKS TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2021
6. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

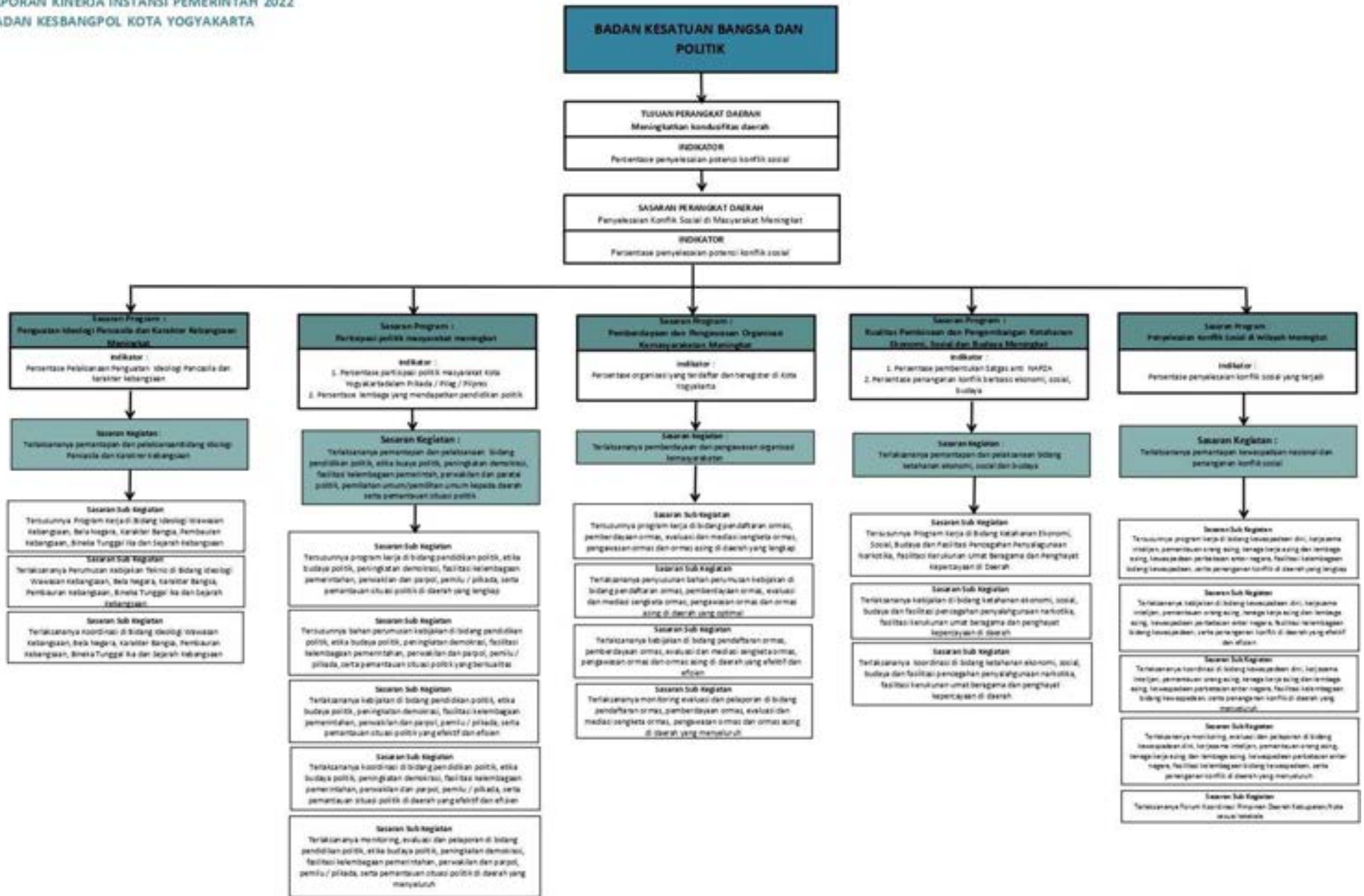
LAMPIRAN 2
CASCADING DAN POHON KINERJA

MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA KE-6
Target Sasaran dan Program Perangkat daerah
Kantor Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran 2017-2022

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	IKU	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD %	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang ditangani/jumlah konflik sosial yang terjadi * 100%	70	-	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	Jml konflik sosial yg ditangani/ jml konflik sosial yg terjadi *100%	71	72,4	76	77			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	Organisasi ber-SKT yang aktif dibagi organisasi ber-SKT dikali 100%	80,92	79,4	80	82	-	-

MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA KE-6
Target Sasaran dan Program Perangkat daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2017-2022

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	IKU	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD %	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang ditangani/jumlah konflik sosial yang terjadi * 100%	70	82	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	Jumlah konflik sosial yg ditangani/ jml konflik sosial yg terjadi *100%	71	72,4	76	77	80	82	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jml peserta yg meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yg disasar dikali 100 %	-	-	-	-	75	80
															PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	Rerata jml masyarakat yg terdaftar dalam DPT Pilkada/Pileg/Pilpres yg menggunakan hak pilih dibagi rerata jml masyarakat yg terdaftar dalam DPT dikali 100%	-	-	-	-	81	81
															PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	Jml lembaga yg disasar pendidikan politik dibagi dg jml lembaga yg terdata di Bakesbangpol dikalikan 100%	-	-	-	-	55,7	61,9
															PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	Jml satgas anti napza di SMP dibagi jml SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	-	-	-	75	80
															PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	Konflik berbasis Sosial, ekonomi budaya yg tertangani dibagi Konflik yg terjadi dikali 100%	-	-	-	-	65	70



LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos : 55151 Telp. (0274) 515865, 515866
EMAIL: kesbangpol@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Santosa, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Haryadi Suyuti
Jabatan : Walikota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 06 JAN 2022

Pihak Kedua

H. Haryadi Suyuti

Pihak Pertama

Budi Santosa, S.STP., M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	82%

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran 2022	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.360.427.212	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.839.410.250	APBD
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.191.393.458	APBD
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 370.841.544	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Rp 1.081.750.270	APBD
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.707.176.548	APBD
Jumlah Anggaran		Rp10.550.999.282	

Yogyakarta, 06 JAN 2022



 Walikota Yogyakarta
[Signature]
 H. Sri Sugiyo Suyuti

Kepala Bakesbangpol


[Signature]
 Bakti Sukosa, S.STP., M.Si.
 NIP. 209141993031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos : 55151 Telp. (0274) 515865, 515866
EMAIL: kesbangpol@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upika@jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMADI, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 17 OCT 2022


Pihak Kedua
SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 196308261989031007


Pihak Pertama
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si
NIP. 197209141993031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

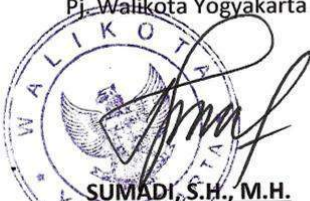
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	82%

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	Anggaran Perubahan 2022	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.572.725.212	P-APBD 2022
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.880.035.250	P-APBD 2022
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.191.174.308	P-APBD 2022
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 475.466.544	P-APBD 2022
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Rp 1.084.325.270	P-APBD 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.774.896.548	P-APBD 2022
Jumlah Anggaran			Rp 10.978.623.132	

Yogyakarta, 17 OCT 2022

Pj. Walikota Yogyakarta

SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 196308261989031007

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Yogyakarta

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si
NIP. 197209141993031004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA

1/18/23, 3:11 PM

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	82 %	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%	82.73 %	100.89	Melampaui target	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.277.105.212,00	1.205.146.349,00	94,37	
								PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.880.035.250,00	1.810.518.545,00	96,30	
								PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.191.174.308,00	1.150.565.908,00	96,59	
								PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	475.466.544,00	443.897.257,00	93,36	
								PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomisocial dan Budaya	1.084.325.270,00	1.069.822.155,00	98,66	
								PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.774.896.548,00	1.731.174.212,00	97,54	
Faktor Pendorong:												
Uraian Permasalahan:												
Rencana Tindak Lanjut:												



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022**BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA****LAMPIRAN 5****MATRIKS TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2021**

**MATRIKS TINDAK LANJUT
ATAS LHE SAKIP TAHUN 2021
PENILAIAN KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Dokumen Renstra telah memuat tujuan dan sasaran lengkap dengan target kerjanya yang telah dipublikasikan		
		Target kinerja telah disusun berdasarkan basis data yang memadai		
		Renstra telah direviu dan sudah ada SOP tentang reviu Renstra		
		Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		
		Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV dan telah dipublikasikan		
2	Pengukuran Kinerja	Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah dipublikasikan		
		Mekanisme pengumpulan data kinerja telah didukung dengan SOP namun belum ada mekanisme yang jelas apabila ada	Melengkapi SOP pengumpulan data kinerja apabila terjadi kesalahan data	Telah menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja apabila Terjadi Kesalahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

		terjadi kesalahan data		Data
		Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan pengumpulan data kinerjanya dapat diandalkan		
		Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		
3	Pelaporan Kinerja	Laporan Kinerja telah disusun, disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan		
		Laporan Kinerja telah menyajikan tingkat keberhasilan indikator sasaran dan program		
		Laporan Kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan		
		Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan antara realisasi atau capaian pada tahun berjalan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas		
4	Evaluasi Internal	Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan setiap tribulan		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

		Dokumentasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikannya perlu ditingkatkan	Meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikannya	Telah meningkatkan dokumentasi atas evaluasi kinerja serta tindak lanjut
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Target output dan outcome telah tercapai Data Capaian indikator kinerja tahun 2021 cukup andal		
6	Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu	Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu sudah ditindaklanjuti		



Mengetahui,
 Kepala Badan Kesbangpol

Budi Santosa, S.STP., M.Si
 NIP. 197209141993031004

LAMPIRAN 6
PRESTASI DAN PENGHARGAAN



Penghargaan Anugerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai Badan Publik Informatif



Peringkat Ke-dua Kategori Eselon II Capaian Kinerja terbaik Tahun 2022